



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun, Kode Pos 63116

Telepon / Faks : (0351) 467327

Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA MADIUN**

**NOMOR : 050/ /401.109/2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KOTA MADIUN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : M A D I U N  
pada tanggal : 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA MADIUN**

**SUBAKRI, S.Sos.,M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680904 198903 1 004**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan APBD Tahun 2022 dan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2023.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023.

Madiun, Maret 2022

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MADIUN**

**SUBAKRI, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680904 198903 1 004**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 - 2024.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 :

1. Implementasi Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Upaya pencapaian tolok ukur kinerja yang akan dilaksanakan mengacu pada target Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Gambaran pendanaan yang akan digunakan untuk mencapai target tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023, meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Berisi Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD



### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 sebagai berikut :

##### **PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - 2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - 2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - 2.1.4 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - 2.1.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program Aplikasi Informatika
  - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - 3.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - 3.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - 3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
  - 3.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
  - 3.2.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
      - 4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
    - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
      - 5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.1.  
Evaluasi Rencana Kerja Semester 2 (dua) Tahun 2021  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		
1				2	3	4	5		7		10=8+9		11=10/7 x 100%		12=6+10		13=12/5 x 100%		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Skor</b>	<b>A</b>	<b>29.087.454</b>	<b>A</b>	<b>7.830.965</b>	<b>A</b>	<b>7.600.471</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>A</b>	<b>7.600.471</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	
			<b>2</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>460.000</b>	<b>100</b>	<b>115.000</b>	<b>100</b>	<b>113355</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>	<b>113.355</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	

			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	80	460.000	20	115.000	20	113.355	100%	99%	20	113.355	25%	25%
			2 · 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan</b>	%	<b>100</b>	<b>15.366.800</b>	<b>100</b>	<b>3.759.400</b>	<b>100</b>	<b>3.656.364</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100</b>	<b>3.656.364</b>	<b>100%</b>	<b>24%</b>
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	15.366.800	100	3.759.400	100	3.656.364	100%	97%	100	3.656.364	100%	24%
			2 · 0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian</b>	%	<b>100</b>	<b>3.153.652</b>	<b>100</b>	<b>1.076.826</b>	<b>100</b>	<b>1.069.624</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>	<b>1.069.624</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>
			10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	paket	1	3.153.652	1	1.076.826	1	1.069.624	100%	99%	1	1.069.624	100%	34%
			2 · 0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan dokumen administrasi umum</b>	%	<b>100</b>	<b>835.172</b>	<b>100</b>	<b>91.447</b>	<b>100</b>	<b>90.721</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	<b>100</b>	<b>90721</b>	<b>100%</b>	<b>11%</b>
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	835.172	100	91.447	100	90.721	100%	99%	100	90.721	100%	11%

			2 · 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	6.574.330	100	2.328.292	100	2261483,35	100%	97%	100	2261483,35	100%	34%
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	6.574.330	100	2.328.292	100	2.261.483	100%	97%	100	2.261.483	100%	34%
			2 · 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	2.697.500	100	460.000	100	408924	100%	89%	100	408924	100%	15%
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	550.000	100	165.000	100	143.706	100%	87%	100	143.706	100%	26%
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	1.265.000	100	132.500	100	129.978	100%	98%	100	129.978	100%	10%
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung dan kantor yang layak digunakan	%	100	882.500	100	162.500	100	135.241	100%	83%	100	135.241	100%	15%

			02		<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik</b>	%	82	27.507.508	75	4.619.278	75	4.554.198	100%	99%	75	4.554.198	91%	17%
			2 · 0 1		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah</b>	%	100	27.507.508	100	4.619.278	100	4.555.198	100%	99%	100	4.555.198	100%	17%
				02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Informasi	4800	14.113.110	1200	2.589.955	1447	2.572.903	121%	99%	1447	2.572.903	30%	18%
				04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Media	5	8.880.353	5	1.416.495	5	1.395.707	100%	99%	5	1.395.707	100%	16%
				06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	1.341.290	100	151.290	100	139.405	100%	92%	100	139.405	100%	10%
				10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kelompok	27	1.412.677	27	201.460	27	190.146	100%	94%	27	190.146	100%	13%
				12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tema Informasi	30	1.760.078	6	260.078	8	257.527	133%	99%	8	257.527	27%	15%



2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	43.150.511	100	9.760.450	100	9.432.535	100%	97%	100	9.432.535	100%	22%
			2 . 0 1		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	25.371.450	100	5.718.547	100	5.592.828	100%	98%	100	5.592.828	100%	22%
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Domain	238	4.226.800	238	26.800	238	21.438	100%	80%	238	21.438	100%	1%
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Titik	1850	21.144.650	1550	5.691.747	1750	5.571.390	113%	98%	1750	5.571.390	95%	26%

			2 · 0 2		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah</b>	%	100	17.779.061	100	4.041.903	100	3.839.707	100%	95%	100	3.839.707	100%	22%
				01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Paket	1	10.100.200	1	2.300.200	1	2.292.840	100%	100%	1	2.292.840	100%	23%
				04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Titik	180	1.855.000	180	455.000	180	393.203	100%	86%	180	393.203	100%	21%
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	28	1.840.000	7	460.000	7	447.572	100%	97%	7	447.572	25%	24%
				08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	paket	4	1.355.106	1	306.823	1	284.458	100%	93%	1	284.458	25%	21%
				09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	%	100	1.759.210	100	404.605	100	339.216	100%	84%	100	339.216	100%	19%

				11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	Unit	1	869.545	1	115.275	1	82.419	100%	71%	1	82.419	100%	9%
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	1.063.278	1	313.278	1	309.909	100%	99%	1	309.909	1%	29%
			2 . 0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	1.063.278	1	313.278	1	309.909	100%	99%	1	309.909	100%	29%
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Dokumen	1	1.063.278	1	313.278	1	309.909	100%	99%	1	309.909	100%	29%
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	1.095.502	100	195.503	100	193.478	100%	99%	100	193.478	100%	18%

			2 . 0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	OPD	11	1.095.502	5	195.503	5	193.478	100%	99%	5	193.478	45%	18%
			04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	berita	3600	1.095.502	900	195.503	983	193.478	109%	99%	983	193.478	27%	18%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 3.1 Capaian Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun  
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,01	82,09	102,56%
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan secara elektronik	Nilai Domain Layanan SPBE	3,3	3,95	119,67%
		Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,15	2,30	106,97%
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,5	97,33	111,23%

Analisis capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran I Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan perbandingan angka realisasi tahun 2021 ini dengan tahun sebelumnya telah terjadi kenaikan nilai target dan realisasi. Kenaikan nilai realisasi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menunjukkan hasil yang baik.

Disamping kenaikan pada capaian kinerja Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya Evaluasi program yang sudah dilaksanakan, karena belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.

- b. Belum optimalnya pemantauan terhadap rencana aksi, dan belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Atas permasalahan yang teridentifikasi sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun akan melaksanakan :

- a. Melakukan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan perencanaan kinerja.
  - b. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi guna mengendalikan kinerja serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
2. Sasaran II Meningkatnya kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan secara elektronik

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan secara elektronik dengan indikator :

- a) Nilai Domain Layanan SPBE, dengan nilai 3,95 dengan capaian kinerja sebesar 119,6% pada Tahun 2021
- b) Nilai Domain Tata Kelola SPBE, dengan nilai 2,30 dengan capaian kinerja sebesar 106,9% pada Tahun 2021

Juga mengalami kenaikan apabila dibanding dengan indikator yang sama pada Tahun 2020. Faktor pendorong atas capaian hasil kinerja tersebut diantaranya :

- a) Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
- b) Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
- c) Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
- d) Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
- e) Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai

Selain faktor pendorong, juga terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi penyebab kurang maksimalnya penerapan SPBE, diantaranya :

- a) Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
- b) Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)
- c) Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan

Kemudian upaya yang dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian sasaran yang kedua ini sebagai berikut :

- a) Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur
- b) Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK
- d) Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

### 3. Sasaran III Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran capaian realisasi dari sasaran ke-3, yaitu 'Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, saat ini menggunakan indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dimana hasil yang tercapai merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2021 capaian realisasi sasaran telah mencapai 111,2% dan meningkat dibanding tahun sebelumnya (2020) yang diperoleh nilai tingkat keterbukaan informasi publik sebesar 95.

Faktor utama dari melebihinya realisasi capaian dari target adalah :

- a) Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun

- b) Adanya payung hukum dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c) Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pembantu)

- d) Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilaksanakan secara berkala

Disamping faktor pendorong, juga terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain:

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.
- b) Kendala yang dialami pada PPID Pembantu, diantaranya :
- Terbatasnya SDM yang menangani PPID Pembantu
  - SDM yang kurang handal dalam penulisan naskah berita dan pengelolaan sistem informasi

Dalam mengatasi berbagai kendala/hambatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik diantaranya :

- a) Meningkatkan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi PPID Pembantu
- c) Melaksanakan peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek
- d) Pelaksanaan PPID Award, sebagai pendorong agar pengelolaan PPID bisa dilaksanakan secara maksimal.



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dalam rangka pengembangan e-government Pemerintah Kota Madiun masih mengalami beberapa tantangan, diantaranya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memberikan akses informasi ke masyarakat tanpa terkecuali. Kondisi demikian mengharuskan setiap Badan Publik di Pemerintah Kota Madiun menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan memperhatikan batasan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semangat meningkatkan pelayanan publik selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dimana dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan Publik wajib menyelenggarakan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kewenangan dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi, Pemerintah Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti penyediaan WiFi gratis di poskamling dan fasilitas umum di wilayah Kota Madiun. Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, Call Center 112, media sosial, aplikasi LAPOR SP4N, Klik WA menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk mendukung pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019 – 2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi Pemerintah Kota Madiun tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
- c. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Untuk mencapai visi, maka diperlukan dukungan semua Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada setiap misi. Sejalan dengan pencapaian misi ke 1 “Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)” maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan dan sasaran organisasi sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kota Madiun. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendukung misi ke 1 “Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Tujuan dan Sasaran dari Misi pertama kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi pertama sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1



Dari gambar diatas terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika Mendukung :

1. Misi pertama : **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**
2. Tujuan : **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities***
3. Sasaran pertama : **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah**
4. Sasaran kedua : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah :

## **“Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik”**

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Jaringan TIK, Sistem Informasi dan Layanan Publik Terintegrasi
4. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik Sektor Perangkat Daerah yang Berkualitas
5. Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
  - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - 2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - 2.1.3 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - 2.1.4 Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
    - 2.1.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
    - 2.1.6 Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 3. Program Aplikasi Informatika
  - 3.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 3.1.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 3.2 Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    - 3.2.1 Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.2.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - 3.2.3 Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - 3.2.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
    - 3.2.5 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
    - 3.2.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
    - 3.2.7 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
  - 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
    - 4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
    - 4.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
    - 4.1.3 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik



Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	RENCANA 2023	
							Target	Pagu Renja (Rp.)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP	A	9.197.167.160
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	200.000.000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	200.000.000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.338.125.960
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	5.338.125.960
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	1.749.400.000
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	1.749.400.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	RENCANA 2023	
							Target	Pagu Renja (Rp.)
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	1.076.641.200
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.076.641.200
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	633.000.000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	150.500.000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	182.500.000
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	300.000.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80%	4.317.714.070
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	4.317.714.070
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen	2.000.000.000
2	16	02	2.01	04	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	1.291.947.580
Kode						Indikator	RENCANA 2023	

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan		Target	Pagu Renja (Rp.)
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen	255.008.450
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 dokumen	340.463.320
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	26 orang	79.160.320
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 dokumen	351.134.400
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	8.730.252.000
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	4.360.000.000
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	82 unit	4.260.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	4.370.252.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	RENCANA 2023	
							Target	Pagu Renja (Rp.)
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	2.500.000.000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	500.000.000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	415.470.000
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	240.782.000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	100.000.000
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	539.000.000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	75.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	270.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	270.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	RENCANA 2023	
							Target	Pagu Renja (Rp.)
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	100.000.000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	3 orang	55.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	115.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	427.500.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	427.500.000
2	20	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000
2	20	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 PD	377.500.000
<b>JUMLAH</b>								<b>Rp22.942.633.230</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Semoga Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2023 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.